

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Mendaftarkan Akta di bawah Tangan (*Waarmerking*) Terhadap Pinjam Nama (*Nominee*) (Studi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PNTpg)?

Oleh
Tiwi Kumala Sari
NIM. 170574201018

ABSTRAK

Praktek pembuatan perjanjian pinjam nama, secara jelas telah melanggar asas nasionalisme yang ada dalam hukum agraria di Indonesia, yaitu hanya warga negara Indonesia yang boleh mempunyai hak milik di negara Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam mendaftarkan surat di bawah tangan pinjam nama (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PNTpg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yakni berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PNTpg, notaris membantu membuat surat di bawah tangan untuk para pihak, kemudian surat di bawah tangan tersebut di daftarkan ke dalam buku khusus oleh notaris yang bersangkutan. Seorang notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuatnya sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika notaris membantu membuat akta di bawah tangan sebelum didaftarkan atau di *waarmerking*, peneliti berpendapat bahwa bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban dari notaris sama sekali. Memang disebutkan bahwa notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta dan tanda tangan para pihak dalam kasus *waarmerking*, tetapi pembebasan tanggung jawab tersebut baru hanya berlaku apabila memang akta di bawah tangan yang ingin di *waarmerking* telah ada dan ditandatangani sedemikian rupa tanpa campur tangan dari pihak notaris. Lain halnya jika notaris membantu membuat akta di bawah tangan sebelum di *waarmerking* oleh notaris yang bersangkutan. Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam hal terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didefinisikan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut tidaklah harus selalu berupa kerugian moril atau materil yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dapat pula berupa melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam petitium gugatan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Notaris, Tanggung Jawab

***Juridical Analysis of Notary Responsibility in Registration of Acts under Hand
(Waarmarking) Against Names (Nominee)
(Study Decision No. 66/Pdt.G/2020/PNTpg)***

**Oleh
Tiwi Kumala Sari
NIM. 170574201018**

ABSTRACT

Loan agreements are a blatant violation of Indonesian agrarian law's nationality principle, which states that only Indonesian people are entitled to property rights in the country. The goal of this study (Case Study of Decision Number 66/Pdt.G/2020/PNTpg) is to ascertain and evaluate the duties of a notary in registering private documents for borrowing names. This study's methodology is normative and intellectual in nature. data gathering techniques using field research and literature reviews. The study's findings revealed that, according to Resolution Number 66/Pdt.G/2020/PNTpg, the notary assisted the parties in creating private letters, which were then registered in a special book by the concerned notary. A notary who drafts a deed is likely to believe that the document is lawful if both parties have consented and are able to pursue legal action. The researcher contends that it does not follow that a notary has no responsibility if they assist in creating a deed under the hand before it is registered or waarmarking. In the waarmarking case, it is claimed that the notary is not responsible for the deed's contents or the parties' signatures; however, this release of liability only applies if the private deed you wish to waarmark only already exists and is signed without the notary's involvement. If the notary assists in drafting the deed before it is signed by the relevant notary, it is a different situation. A notary may also be held civilly liable if it is established that he committed an unlawful act as defined in Article 1365 of the Civil Code; however, the loss mentioned in that article need not always take the form of a moral or material loss that can be measured in monetary terms; it may also take the form of breaking a specific law as stated in the lawsuit's petition.

Keywords: Nominee Arrangement, Notary , responsibility